

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu mengenai keterlibatan perempuan dalam politik merupakan soal yang akan terus mewarnai percaturan politik di belahan dunia manapun. Di negara yang sistem demokrasinya sudah mapan sekalipun, permasalahan perempuan dan politik menjadi tema penting dalam perhelatan demokrasi. Terlebih di negara – negara berkembang, dimana budaya patriarki¹ masih sangat kental, tema perempuan dan politik selalu memicu perdebatan sengit. Politik yang selalu diidentikan dengan penuh intrik dan licik, menjadi wilayah yang diharamkan dan harus disterilkan dari tangan lembut kaum hawa, karena dianggap hanya keperkasaan kaum adam saja yang mampu menjelajahi keliaran belantara politik tersebut.

Ada begitu banyak persoalan yang dihadapi oleh kaum perempuan dan sangat kompleks. Semua itu sudah menjadi realitas obyektif yang tidak terbantahkan. Kemiskinan, kekerasan, ketidakadilan/diskriminasi sering disebut – sebut sebagai persoalan krusial yang dialami kaum perempuan dari masa ke masa. Wajar jika muncul semacam prasangka di sebagian kalangan perempuan bahwa pada zaman apapun, kaum perempuan akan selalu berada pada pihak yang tidak diuntungkan dan tersubordinasi² kaum laki – laki.

Hal ini tentu bukan tanpa bukti, berbagai macam fakta dapat dipakai sebagai alat analisis untuk melihat seberapa parah persoalan yang mengungkung kehidupan kaum

¹Patriarki adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan system sosial dimana kaum laki-laki sebagai suatu kelompok mengendalikan kekuasaan atas perempuan. Siti Musdah, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan*(Jakarta: Kibar Press,2007),h xiii

²Subordinasi adalah kedudukan bawahan, kelas kedua (perempuan) terhadap pihak dominan laki-laki. Bustamin Basyir, *Islam dan Gender*(Jakarta,2007), h.4

perempuan. Laporan United Nation Development Program (UNDP) tahun 1996, menyebutkan bahwa 20% dari 1,3 miliar penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan adalah kaum perempuan. Fakta ini tak jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia, jika dilihat dari komposisi penduduk miskin yang ada. Dilaporkan pula bahwa sekitar 67% dari total penduduk dunia yang buta huruf (sekitar 600 juta jiwa) juga dari kalangan perempuan³. Sekarang ini, sekitar 8,5 juta rakyat Indonesia masih mengalami buta huruf. Lebih dari separuhnya atau 5,1 juta di antaranya adalah kaum perempuan. Di Nusa Tenggara Timur sendiri saat ini kurang lebih ada 402.030 rakyat NTT yang masih buta huruf dan hampir sebagian besarnya adalah perempuan.

Serangkaian data yang dikeluarkan UNIFEM (dana PBB untuk perempuan) tentang kekerasan menunjukkan bahwa di Turki jumlah perempuan yang mengalami kekerasan oleh pasangannya mencapai 57,9 % pada tahun 1998. Di India, jumlahnya mencapai 49% pada tahun 1999, di Amerika Serikat jumlahnya mencapai 22,1 %. Di Banglades, laporan terakhir tahun 2000 menyebutkan 60 % perempuan kawin mengalami kekerasan oleh suami. Di Indonesia sendiri, sekitar 24 juta perempuan atau 11,4 % dari total penduduk indonesia pernah mengalami tindak kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan dewasa ini tidak saja merupakan masalah individu, melainkan juga merupakan masalah nasional dan bahkan sudah merupakan masalah global.

Data Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) yang dimuat dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Jumlah kasus KTP 2015 sebesar 321.752, bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama atau Badan Peradilan Agama (PA-BADILAG) sejumlah 305.535 kasus, dan dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 16.217 kasus; Terpisah dari jumlah tersebut, ada sejumlah 1.099

³Saidah dan Khatimah, Revisi politik perempuan (Bogor: CV.Idea Pustaka Utama, 2003) h.26

kasus yang diadukan langsung ke Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR) yang sengaja didirikan Komnas Perempuan untuk menerima dan merujuk pengaduan korban yang datang langsung maupun yang masuk lewat surat dan surat elektronik.

Pada tahun 2015 Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berada pada urutan ketujuh tertinggi di Indonesia sebagaimana data dari Komnas Perempuan. Selama Tahun 2000-2014, rata-rata setiap hari ada 35 perempuan Indonesia menjadi korban kekerasan. Berdasarkan data dari Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi NTT, selama tahun 2015 hingga tahun 2016, sebanyak 600 kasus kekerasan terjadi pada perempuan.

Ada begitu banyak faktor yang menyebabkan tidak teratasinya berbagai persoalan yang terjadi pada perempuan. Salah satunya adalah berbagai kebijakan yang tidak pro terhadap kepentingan kaum perempuan. Kebijakan yang dihasilkan oleh para pengambil kebijakan terkadang tidak mengakomodir kepentingan perempuan. Kultur masyarakat yang masih patriarkhal turut mempengaruhi para pengambil kebijakan. Sehingga kebijakan yang diambil pun belum proporsional.

Yang memahami berbagai persoalan yang dialami kaum perempuan adalah perempuan itu sendiri. Untuk itu kaum perempuan perlu mengambil bagian bahkan menjadi sebuah keharusan untuk berpolitik. Karena hanya dengan berpolitiklah kaum perempuan dapat mengintervensi berbagai kebijakan yang ada, hanya dengan berpolitik saja kaum perempuan dapat ikut merumuskan kebijakan yang proporsional, hanya dengan berpolitiklah kepentingan kaum perempuan dapat diakomodir dengan baik melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.

Khusus keterlibatan perempuan dalam politik pada era reformasi menemukan momentumnya ketika pada tanggal 18 Februari 2013, DPR mengesahkan Undang – Undang Pemilu, dimana salah satu klausul yang dianggap progresif sekaligus kontroversial adalah dicantumkannya “kuota 30 persen perempuan” dalam nominasi calon legislatif di berbagai tingkatan, yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1). Secara lengkap pasal itu berbunyi : setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan untuk setiap daerah pemilihan dengan keterwakilan perempuan sekurang – kurangnya 30 persen⁴. Kuota 30 persen diakui sebagai langkah awal bagi partisipasi politik perempuan di Indonesia. Aturan ini kemudian menjadi salah satu jalan bagi hadirnya perbaikan nasib perempuan melalui mekanisme legislasi parlemen.

Masuknya perempuan ke dalam lembaga legislatif diharapkan dapat menjadi kekuatan penekan sekaligus eksekutor dalam isu – isu publik khususnya yang menyangkut hajat hidup perempuan, partisipasi perempuan di parlemen juga membersitkan secercah harapan, dimana perempuan dapat mengeliminasi kebijakan publik. Suatu kesadaran baru yang selama ini cenderung bercorak maskulin.

Yang perlu ditekankan adalah kaum perempuan ingin mengambil bagian dalam bidang politik karena didasari oleh suatu dalil bahwa melalui bidang politiklah segala kebijakan yang bersentuhan dengan masalah publik dapat dibuat secara proporsional. Secara implicit bermakna perempuan harus mengubah tatanan hidup bermasyarakat dan bernegara melalui partisipasi dalam pembuatan kebijakan publik. Suatu kesadaran baru

⁴Ani Widyani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana* (Jakarta: Kompas,2005) h. 42-43

yang merupakan akumulasi dari serentetan perjuangan yang pernah dilakukan kaum perempuan.

Pada pemilu 2009 di Dapil 1 Kabupaten Kupang dari 193 calon legislatif yang diusung oleh 44 partai politik, terpilih 8 calon legislatif menjadi anggota legislatif.

Dari 8 orang calon legislatif yang terpilih, terdapat 2 orang perempuan yang juga terpilih menjadi anggota legislatif dengan perolehan suara yang cukup signifikan dan salah satunya adalah Deasy M.C.Ballo-Foeh yang diusung oleh PDI P. Tidak hanya lolos pada pemilihan umum legislatif 2009, Deasy M.C.Ballo-Foeh juga lolos pada pemilihan umum legislatif 2014.

Berikut ini perbandingan jumlah suara Calon Legislatif Dapil 1 yang menang pada pemilihan umum 2009 dan 2014.

Tabel 1.1 Hasil Rekapitulasi suara pemilu Dapil 1 DPRD Kabupaten Kupang tahun 2009 untuk caleg yang terpilih sebagai berikut :

No.	Partai Politik	No. Urut	Nama Calon Terpilih	Jumlah Suara
1	Partai Hanura	2	Yandri Rudolf Nalle	632
2	Partai Gerindra	4	Mauricio S.A.De A. Freitas	845
3	PRN	4	Jonisius Sae,S.Pt	567
4	Partai Golkar	2	Piter Humau	1.761
5	Partai Golkar	8	Octori Gasperz,S.AP	876
6	PDI P	1	Maria Nuban Saku,SH	2.630

7	PDI P	3	Deasy M.C.Ballo-Foeh	1.197
8	Partai Demokrat	1	Matheos Liu,SE	856

Sumber : KPUD Kabupaten Kupang 2015

Tabel 1.2 Hasil Rekapitulasi suara pemilu Dapil 1DPRD Kabupaten Kupang tahun 2014 untuk caleg yang terpilih sebagai berikut :

No.	Partai Politik	No. Urut	Nama Calon Terpilih	Jumlah Suara
1	PDI P	3	Deassy M.C.Ballo-Foeh	2.618
2	PDI P	1	Drs.Soleman Dethan	827
3	Partai Gerindra	1	Drs.Andris Ferdy E.Adu	1.235
4	Partai Gerindra	2	Tome Da Costa,SH	1.149
5	PAN	5	Albertus K. Meok	1.103
6	Partai Demokrat	5	Jenri R. Oematan-Touselak	826
7	Partai Hanura	10	Wilhelmus P. M. Falukas	853
8	PKPI	11	Semuel Koroh	737

Sumber : KPUD Kabupaten Kupang 2015

Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa Deassy M.C. Ballo-Foeh memperoleh suara terbanyak ketiga dari delapan calon legislatif yang terpilih menjadi anggota legislatif dengan jumlah 1.197 suara. Sedangkan pada tabel 1.2 juga menunjukkan bahwa Deassy M.C.Ballo-Foeh kembali mendulang suara dalam pemilihan umum legislatif 2014 dengan jumlah 2.618 suara. Artinya jumlah suara yang diperoleh Deassy M.C. Ballo-Foeh pada pemilihan umum legislatif 2014 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan selisih 1.421 suara dari pemilihan

umum legislatif sebelumnya. Dari peringkat ketiga pada pemilihan umum legislatif 2009 menjadi peringkat pertama pada pemilihan umum legislatif 2014.

Berdasarkan hasil tersebut diatas penulis melihat bahwa kemenangan Deassy Ballo dalam pemilu legislatif merupakan sebuah hal yang sangat menarik dan perlu ditelaah lebih jauh. Mendulang suara yang signifikan dalam pemilihan umum bagi seorang perempuan sudah tentu bukanlah hal yang mudah dalam konteks kehidupan yang masih patriarkhal seperti sekarang ini. Tentu butuh kerja keras dan juga butuh strategi yang memadai untuk kemudian bisa mendapatkan dukungan dari konstituen.

Dari sekian banyak strategi yang dapat digunakan sebagai daya tarik bagi konstituen, diduga salah satunya adalah kualitas pribadi yang dimiliki. Baik itu kekhasan yang dimiliki, kepribadiannya, rekam jejak yang baik, karakter dan juga kemampuan dalam memimpin tentu dapat digunakan untuk kemudian mendapat simpati dari konstituen.

Beberapa hal mengenai kualitas pribadi yang dimiliki kemudian *Dewi Haroen* menyebutnya sebagai *Personal Branding*. *Personal Branding* adalah suatu proses membentuk persepsi masyarakat terhadap aspek-aspek yang dimiliki oleh seseorang. Menurutnya *personal branding* merupakan persepsi yang tertanam dan terpelihara dalam benak orang lain. Tujuannya adalah bagaimana orang lain itu punya pandangan positif atau persepsi positif sehingga bisa berlanjut ke trust atau ke aksi-aksi lainnya, misalnya memilihnya sebagai caleg atau menggunakan jasanya⁵.

⁵Dewi Haroen, *Personal Branding* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2014) h.13

Lebih lanjut Junaedi (Dewi Haroen,2014:17) menjelaskan bahwa *personal brandingsangatlah dahsyat*. Hal ini dapat dilihat dari kesuksesan SBY dalam memenangkan pemilihan presiden secara langsung dua kali berturut-turut tahun 2004 dan 2009.Padahal, saat pemilu 2009, berbagai iklan politik menyerangnya secara bertubi-tubi dan menohok kebijakannya.Namun ternyata, dalam Pemilu 2009, rakyat tetap memilih SBY sebagai presiden.Citra yang telah terbangun dan melekat pada sosok SBY ternyata tidak mudah dijatuhkan dengan iklan politik.

Berlandaskan keterangan – keterangan dan kenyataandiatas serta pemikiran dari *Dewi Haroen* penulis kemudian tertarik untuk menulis bahkan meneliti lebih jauh mengenai **“Perempuan dan Politik (Studi Kasus Personal BrandingDeasy Dalam Pileg 2009 dan 2014 di Kaputen Kupang)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan gambaran masalah pada latar belakang, serta mengacu pada judul penelitian ini, maka yang menjadi permasalahan pokok pada penelitian ini adalah Bagaimana Personal Branding Deassy Ballo dalam Pileg 2009 dan 2014 di Kabupaten Kupang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkanPersonal Branding Deassy Ballo dalam Pileg 2009 dan 2014 di Kabupaten Kupang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai perempuan dan politik .
- 2) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai perempuan dan politik.
- 3) Untuk Caleg perempuan dan perempuan yang berminat dalam dunia politik.
- 4) Sebagai masukan bagi partai politik dalam merekrut kader maupun caleg perempuan.